DAFTAR PUSTAKA

Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *1*(January), 36. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36

April, N., Nasution, R. P., Milen, S., Ramadhan, K. I., Jl, A., Iskandar, W., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., Serdang, K. D., & Utara, S. (2024). *Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023 penyelesaian perkara pidana di Indonesia . Adanya undang-undang ini menimbulkan*. *2*(1).

Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(2), 1–14. https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28

Arisan, P., Menurut, O., & Tahun, U. N. (2019). Jurnal normatif fakultas hukum universitas al azhar. *Jurnal Normatif*, 18–26.

Cahyani, A. I. (2021). *Penulis adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Fiqih Muamalah * Jurnal Al- Qadāu Volume 1 Nomor 2/2014* |. *1*.

Eddyono, S. et all. (2020). *Praperadilan Penahanan Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia (PDFDrive.com)*. 208. http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/02/Praperadilan-di-Indonesia.pdf

Faisal, F. (2021). Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *21*(1), 81–95. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5

Ferdricka Nggeboe, S.H., M. H. (2022). Tinjauan Tentang Keseimbangan Peran Penegak Hukum (Polisi) Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal LEX SPECIALIS*, *12*, 42–50.

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *1*(1),

1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311

Hukum (bagian, P., Faktor-Faktor,) C, Mempengaruhi, Y., & Hukum, P. (2020). *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 24*. *Bagian 3*.

Indonesia, R. (2019). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. In *Kuhap*.

Irawan, A. (2017). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS, 7*(1), 29–36.

Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, *3*(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106

Kader, A. S. (2014). 146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , *2*(2).

Katili, V. (2020). *Lex et Societatis , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*. *1*(1), 163. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. *151*(2), 10–17.

Mattalitti, L. N., & Lalolorang, G. A. (2022). Kajian Yuridis Penetapan Sprindik Berulangkali Oleh Kejaksaan Setelah Gugatan Praperadilan Diterima. *Lex Crimen*, *5*(6), 97–105.

Moch Adhitya Rifka Wibowo, & Sunarto Sunarto. (2024). Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 306–320. https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125

Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA). *PATIK: Jurnal Hukum*, *07*(2), 123–136.

https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik

Paputungan, E., Inaku, R., Paputungan, F., & Pendidikan, T. (2023). the Laws of Growth and Development. *Journal of Education and Culture (JEaC)*, *3*(2), 2986–1012.

Qur'aniyah, M., & Ravizki, E. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Penegak Hukum (Jaksa) Pelaku Tindak Pidana Sodomi. *Jurnal Darma Agung*, *32*(4), 130–134.

Rahmatullah, I. (2022). *Legal Positivisme Hukum*. *6*(1), 1–12.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan hak sipil dan politik*. 14.

Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., Wahyuni, T., Hukum, M., Pamulang, U., & Selatan, T. (2023). PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal IKAMAKUM*, *3*(1), 18–25.

Rusman Sumadi. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(1), 149–162. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597

Sudikno Mertokusumo. (1997). Sistem Peradilan dI Indonesia. *Hukum Ius Quia Iustum*, *9 Vol. 6*, 1–8. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6927/6114

Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 96. https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672

Supriyanta. (2017). Prinsip Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. *UNISRI Surakarta*, *3*(6), 1–18.

Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *3*(1). https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17444

Syaiful Bachri*, Loc.Cit*

Moch.Faisal Salam. *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek,* Mandar Maju, Bandung, 2001*,* hlm. 1

S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 84

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 122

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 173**.**

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 215.

Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 173;

Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum setelah memulai penyidikan

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Routledge, 2007); John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (Hackett Publishing, 2000).

Stanislaus Suarlembit, "Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik ke Penuntut Umum," Jurnal Pidana, Vol. 4 No. 1, 2020.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8–12.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 15.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2007), hlm. 23.

Rifqi Nawawi, "Implikasi Hukum atas Tidak Diserahkannya SPDP oleh Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2018.